

KONSEP-KONSEP POLITIK

(Teori politik, Masyarakat, Kekuasaan dan Negara)

Oleh:

Adiyana Slamet

Pengertian Teori

- Teori adalah abstraksi dari realitas
- Teori terdiri dari prinsip –prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.
- Teori merupakan seperangkat pernyataan yang sistematis, metodis, logis dan faktual yang dikemukakan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah realitas
- Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena (Budiardjo, 1998:30)
- Teori merupakan perumusan dan kongkretisasi idea-idea yang abstrak (Isjwara, 1999:66)

Fungsi-fungsi Teori

- Mengorganisasikan dan menyimpulkan.
- Memfokuskan.
- Menjelaskan.
- Mengamati.
- Memprediksi
- Komunikasi
- Kontrol/mengawasi
- Generatif

Fungsi Teori Politik

Menurut David Easton (Varma, 2007:133) teori politik memenuhi sejumlah fungsi:

1. Memungkinkan mengenali variabel-variabel politik yang penting dan menerangkan hubungan masing-masing.
2. Adanya kerangka teori yang diterima secara luas oleh para peneliti di lapangan agar dapat memungkinkan diadakannya perbandingan antara hasil-hasil penelitian yang bermacam-macam, dengan demikian orang tidak hanya dapat memeriksa hasil kesimpulan yang diambil oleh pelaku penelitian terdahulu, tapi juga dapat menunjukkan wilayah riset yang masih membutuhkan tambahan penelitian secara empiris.
3. Adanya kerangka teori, setidaknya sekumpulan konsep-konsep yang secara relatif konsisten, juga menolong kita membuat riset yang lebih dapat diandalkan.

Teori Politik

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas:

1. Tujuan dari kegiatan politik
2. Cara-cara untuk mencapai tujuan itu
3. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu, dan
4. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu (Budiardjo, 1998:30)

Menurut Easton (Varma, 2007:130) Teori politik terdiri dari tiga unsur:

1. Keterangan tentang fakta-fakta atau deskriptif
2. Teori murni, atau teori sebab akibat yang berusaha mencari hubungan yang dianggap ada antara fakta-fakta, dan
3. Teori nilai yang menentukan keterangan-keterangan preferensi yang saling berhubungan.

Fakta menurut Easton dapat didefinisikan “kenyataan yang khusus disusun untuk sebuah kepentingan teori”.

Menurut Thomas P. Jenkin *The Study Of Political theory* dibedakan dua macam teori politik:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (norms for political behavior). Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuational* (mengandung nilai). Yang termasuk teori golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya (pendekatan klasik/tradisional).

Fungsi teori ini menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan norma-norma moral.

Filsafat Politik (*Political Philosophy*)

Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan ratio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari phenomena politik. Pokok utama dari filsafat politik ialah persoalan-persoalan yang menyangkut methaphysika dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari. Menurut Plato filsafat politik adalah “usaha mencapai pengetahuan politik atau kebijaksanaan politik”.

Teori Politik Sistematis (*Systematic Political Theory*)

Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi. Tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik.

Ideologi Politik (Political Ideology)

Ideologi politik adalah “himpunan nilai-nilai, idea, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau kelompok, atas dasar dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya”. Nilai-nilai dan idea-idea ini merupakan sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adaah keyakinan akan adanya suatu pola tata-tertib sosial politik yang ideal (Islamisme,Marhaenisme (Pancasila),demokrasi,Marxisme, liberalisme, Fascisme,sosialisme dll)

2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. (pendekatan modern/behavioralisme)

Masyarakat

Mc Iver: “ Masyarakat suatu sistem hubungan-hubungan yang tertib. Dan menurut Harold J Laski masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terwujudnya keinginan-keinginan bersama”.

Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, Harold Laswell memperinci delapan nilai (Masyarakat Barat), yaitu:

- 1.Kekuasaan
- 2.Pendidikan/penerangan
- 3.Kekayaan
- 4.Kesehatan
- 5.Keterampilan
- 6.Kasih sayang
- 7.Kejujuran dan keadilan
- 8.Keseganan, respek

Kekuasaan

Kekuasaan: “kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku atau orang yang memiliki”.

kekuasaan politik adalah “kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

Dimensi-dimensi Kekuasaan

Untuk memahami gejala-gejala politik kekuasaan secara tuntas maka kekuasaan ditinjau dari enam dimensi, yaitu:

1. Dimensi Potensial dan Aktual. (Dimensi kekuasaan potensial memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, senjata, informasi pengetahuan, populeritas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisir dan jabatan). (Kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya kedalam kegiatan politik secara efektif)
2. Dimensi Konsensus dan Paksaan. (dimensi paksaan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik)
3. Dimensi Positif dan Negatif
4. Dimensi Jabatan dan Pribadi
5. Dimensi Implisit dan Eksplisit
6. Dimensi langsung dan tidak langsung. Surbakti (1992:59-64)

Pelaksanaan Kekuasaan Politik

Tiga masalah utama yang selalu diamati oleh ilmuan politik sehubungan dengan kekuasaan politik, yakni:

1. Bagaimana kekuasaan politik dilaksanakan
2. Bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan
3. Mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada orang atau kelompok lain dalam situasi dan kondisi tertentu.

Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama (seluruh warga Negara).

- **Roger H. Soltau:** “ Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”
- **Harold J. Laski:** “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.”
- **Max Weber:** “ negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.”